

ANALISIS PELUANG DAN POTENSI INVESTASI WILAYAH PERBATASAN JAWA BARAT DAN JAWA TENGAH (KABUPATEN BREBES, KABUPATEN CIREBON DAN KABUPATEN KUNINGAN)

Dian Purnomo Jati, S.E. M.Sc.¹⁾

Eduardus Yudhistira K.U, S.E.¹⁾

Email: dyan_pj@yahoo.com

eduardusyudhistira_ku@yahoo.co.id

¹⁾Universitas Jendral Soedirman

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify the investment opportunity in Central Java and West Java. The border region has lesser notice by each region government. Based on the result show that each region has different unique potential that could be modernize the economics matters. The Regency of Brebes has potentially on the red onion and the Regency of Cirebon has potentially on fishery, mango gedong gincu, and guava also the Regency of Kuningan has potentially on farming, such as sweet potato and scallion, the sweet potato export already into the paste sweet potato. Further expectation the investment could be cooperated by the local goverments to reach better citizen prosperity. Several cooperation activities that local governments could do is supply the red onion by the local governments of Brebes for the industry of fried onion in Kuningan District. The opportunity for Cirebon District and Brebes is supply on egg duck as a raw material for salted egg in Brebes District. In the field of agriculture, cooperation may be held manufacturing reservoirs to irrigate agricultural land in the region of the third sector to work together to transport infrastructure connecting each area. In other areas, establishment of the rest area in which there are such typical food outlets all three areas, art and culture that characterizes the area, the objects and the region's tourism destinations if only able to attract tourists to come visit the area proficiency level and supply stores basic needs among the border region. At the rest area can also be used as a source of information about the area for the tourists who resting.

Keywords: potency, investment opportunities, cooperation

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi dan peluang investasi daerah yang berada di daerah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selama ini, daerah yang terdapat di daerah perbatasan kurang diperhatikan oleh pemerintah provinsi di masing-masing daerah. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa masing-masing daerah memiliki potensi khas yang berbeda satu sama lainnya

sehingga bisa menjadi peluang menjalin kerja sama regional. Kabupaten Brebes memiliki potensi investasi pengembangan komoditas bawang merah, sedangkan Kabupaten Cirebon memiliki komoditas unggulan di sektor tanaman pertanian dan tanaman buah. Berikutnya kabupaten Kuningan memiliki komoditas unggulan di tanaman perkebunan. Peluang kerja sama investasi yang bisa dilakukan oleh ketiga daerah tersebut diantaranya; pengolahan produksi bawang goreng antara Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kuningan serta pengolahan produksi telur asin antara Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cirebon. Di sektor pertanian ketiga daerah bisa melakukan kerja sama dalam hal pengairan lahan pertanian. Selanjutnya di sektor pariwisata ketiga daerah bisa menjalin kerja sama dalam bentuk penyusunan model paket wisata dan mendirikan rest-area dengan tujuan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Kata Kunci : potensi, peluang investasi, kerja sama

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan wilayah merupakan suatu proses yang melibatkan banyak elemen, memerlukan strategi dan rencana tindakan untuk merealisasikan potensi yang diidentifikasi, mengatasi berbagai faktor penghambat pengembangan, mendorong pertumbuhan ke lingkup wilayah yang lebih luas, serta meningkatkan kapasitas yang bermuara pada penciptaan keunggulan kompetitif daerah. Kebijakan yang bersifat *top-down* sesungguhnya merupakan suatu tradisi pembangunan wilayah yang berbasis pada model ekonomi neoklasik. Pengembangan dari atas berasumsi bahwa pengembangan wilayah terjadi ketika distimulasi oleh kekuatan luar seperti pasar ekspor, investasi dari luar, dan migrasi. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) menjadi prioritas nasional dalam mewujudkan desentralisasi ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, pemanfaatan secara optimal sumber

daya alam, sumber daya manusia, dan modal yang ada di daerah. Pengembangan Ekonomi Lokal didasarkan pada kemampuan lokalitas, faktor internal, dan pertumbuhan ekonomi lokal, dengan menggunakan potensi sumber daya alam setempat untuk membentuk daya saing daerah. Untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah dan tercapainya keberhasilan pembangunan ekonomi daerah diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan potensi ekonomi daerah yang bersangkutan (Arsyad, 1999: 109).

Pembentukan kluster penting untuk dilakukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional karena kluster secara implisit berperan penting dalam menumbuhkan serta merepresentasikan pasar. Terdapat banyak kluster yang identik, dengan tidak ada perbedaan produk dan dalam persaingan harga, keuntungannya rendah karena nilai

tambah per tenaga kerjanya yang rendah, produk-produknya secara tipikal merupakan produk berteknologi rendah dan padat tenaga kerja. Secara umum permasalahan yang timbul terkait dengan klaster adalah masih lemahnya strategi pengembangan dan penentuan klaster apa yang akan dikembangkan, sehingga pengidentifikasian produk unggulan daerah menjadi sangat penting perannya dalam upaya pengembangan ekonomi lokal.

Menurut Michael Porter, keunggulan adalah kondisi yang harus diciptakan, bukan sesuatu yang *given*. Di era yang sekarang, melimpahnya kekayaan alam dan rendahnya upah tenaga kerja tidak bisa lagi digunakan sebagai bekal untuk unggul dalam persaingan. Inovasi dan perbaikan kualitas yang kontinyu, serta efisiensi menjadi kunci dalam membangun produk unggulan. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah perlu mengembangkan konsep produk unggulan yang berbasis pada potensi daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah.

Perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat terdapat kawasan yang disebut Cibening, meliputi Cirebon, Brebes dan Kuningan. Untuk meningkatkan Pembangunan Wilayah Kabupaten diperbatasan provinsi Jawa Tengah bagian selatan, diperlukan suatu kebijakan pengembangan wilayah yang terarah dan sesuai dengan potensi ekonomi wilayah yang terdapat pada masing-masing kecamatan di wilayah perbatasan tersebut. Dengan mengetahui potensi dan pola pertumbuhan ekonomi wilayah di setiap wilayah Kecamatan

di Kabupaten perbatasan Provinsi Jawa Tengah bagian selatan, diharapkan kebijakan dan program pengembangan wilayah yang di terapkan untuk mengembangkan wilayah perbatasan tersebut akan menjadi lebih jelas arahnya.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes, Cirebon dan Kuningan.
2. Untuk mengidentifikasi sektor basis dan komoditas unggulan di Kabupaten Brebes, Cirebon dan Kuningan.
3. Untuk menyusun potensi kerja sama wilayah pengembangan perekonomian kawasan perbatasan di Kabupaten Brebes, Cirebon dan Kuningan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan Studi Kasus : Pengembangan Wilayah yang diterapkan di wilayah Kabupaten Brebes, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan.

1. Sumber Data .

Penelitian ini menggunakan data Primer hasil survei dan pengamatan di lapangan serta data sekunder yang diperoleh dari BPS, Bappeda, Kantor Kecamatan di Kabupaten Brebes, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Kuningan.

2. Jenis Data

Data sekunder: PDRB tahun 2008–2009, Renstra Kabupaten

Cirebon, Kabupaten Kuningan,
Kabupaten Brebes

3. Periode Penelitian.

Periode penelitian Pola
Pengembangan Wilayah
Kecamatan di Kabupaten
Brebes, Kabupaten Cirebon,
Kabupaten Kuningan antara
tahun 2008 sampai tahun 2009.

4. Alat Analisis

Location Quotient

Metode ini merupakan cara
permulaan untuk mengetahui
kemampuan suatu daerah
dalam sektor kegiatan tertentu.
(Warpani ,1988)

Formulasi model Location
Quotient :

$$LQ = \frac{Y_{ij}/Y_j}{Y_i/Y}$$

Keterangan :

LQ : Location Quotient.

Y_{ij} : PDRB sektor i pada
daerah Kecamatan/Kabupaten
ke j.

Y_j : PDRB di daerah
Kecamatan/Kabupaten ke j.

Y_i : PDRB
Kabupaten/Propinsi sector i.

Y : PDRB Kabupaten/
Propinsi.

Kriteria analisa yang
digunakan adalah :

a. Bila $LQ > 1$, maka sektor
tersebut

dikategorikan sebagai sektor
basis/ekspor.

b. Bila $LQ < 1$, maka sektor
tersebut

dikategorikan sebagai sektor
non

basis/lokal.

D. Analisis Data

1. Analisis Pertumbuhan PDRB dan Komoditas Unggulan di Kabupaten Brebes, Cirebon dan Kuningan

Pada perbandingan PDRB
Brebes dari tahun 2008
sampai dengan 2009, dapat
dilihat bahwa sektor
pertanian, pertambangan,
perindustrian, perdagangan,
jasa, listrik, gas dan air bersih
konstruksi, pengangkutan dan
jasa dunia usaha mengalami
kenaikan. Tapi dari tabel
diatas, sektor pertanian
adalah sektor yang
menyumbang PDRB terbesar
Kabupaten Brebes. Sehingga
sektor pertanian merupakan
sektor unggulan Kabupaten
Brebes.

Berdasarkan tabel LQ di
bawah, Kabupaten Brebes
memiliki 3 sektor basis dan 6
sektor non basis. Sektor
basis di Kabupaten Brebes
yaitu sektor pertanian,
pertambangan dan
perdagangan. Sedangkan 6
sektor non basis Kabupaten
Brebes adalah perindustrian,
jasa, listrik gas dan air bersih,
konstruksi, pengangkutan,
jasa dunia usaha. Kriteria ini
dilihat dari apabila $LQ > 1$
artinya bahwa komoditas
tersebut menjadi basis atau
sumber pertumbuhan
ekonomi. Komoditas
memiliki keunggulan
komparatif yang tidak hanya
mampu mencukupi
kebutuhan daerah tetapi bisa
diekspor ke luar daerah.

Komoditas ini ditetapkan sebagai komoditas unggulan. Apabila $LQ < 1$, artinya bahwa sektor tersebut tidak menjadi sektor basis. Komoditas tidak memiliki

keunggulan komparatif, produksinya belum bisa memenuhi kebutuhan daerah dan masih harus mengimpor dari daerah lain.

Tabel 1
Perbandingan PDRB Brebes dan Jawa Tengah
(Jutaan Rupiah)

No	Sektor	Brebes		Jawa Tengah	
		2008	2009	2008	2009
1	Pertanian	5.894.820,70	6.442.861,07	72.862.985,73	79.342.553,91
2	Pertambangan	130.165,24	155.343,83	3.514.457,82	3.852.796,77
3	Perindustrian	1.208.034,97	1.530.865,63	125.006.771,42	130.352.154,42
4	Perdagangan	2.316.984,50	2.518.885,78	71 617 054,69	78 262 543,48
5.	Jasa – jasa	503.920,58	590.303,29	35 480 336,36	39 246 429,89
6.	Listrik, Gas dan Air Bersih	85.246,60	96.648,44	3.749.439,12	4.114.517,64
7.	Konstruksi	196.788,30	245.257,27	21 196 201,77	24 448 721,40
8.	Pengangkutan	348.773,76	431.199,44	21 091 610,95	23 836 789,16
9.	Jasa Dunia Usaha	246.933,40	307.006,52	12 617 097,04	14 447 437,07
	Jumlah	9.550.916,48	11.134.037,66	367.135.954,90	397.903.943,74

umber: Brebes dalam Angka 2010 dan Jawa Tengah Dalam Angka 2010

Tabel 2
LQ Kabupaten Brebes

No	Sektor	Brebes		Rata-Rata
		2008	2009	
1	Pertanian	2,67	2,68	2,67
2	Pertambangan	1,22	1,33	1,28
3	Perindustrian	0,32	0,39	0,35
4	Perdagangan	1,07	1,06	1,06
5.	Jasa – jasa	0,47	0,50	0,48
6.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,85	0,86	0,86
7.	Konstruksi	0,38	0,42	0,40
8.	Pengangkutan	0,67	0,71	0,69
9.	Jasa Dunia Usaha	0,80	0,84	0,82
	Jumlah	1,00	1,00	1,00

Sumber: Data Diolah

Pada perbandingan PDRB Cirebon dari tahun 2008 sampai dengan 2009, dapat

dilihat bahwa sektor pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, jasa, listrik, gas

dan air bersih, konstruksi, pengangkutan dan jasa dunia usaha mengalami kenaikan. Tapi dari tabel diatas, sektor pertanian adalah sektor yang menyumbang PDRB terbesar Kabupaten Cirebon. Sehingga sektor pertanian merupakan sektor unggulan Kabupaten Cirebon. Berdasarkan tabel LQ diatas, Kabupaten Cirebon memiliki 5 sektor basis dan 4

sektor non basis. Sektor basis di Kabupaten Cirebon yaitu sektor pertanian, jasa-jasa, konstruksi, pengangkutan, dan jasa dunia usaha. Sedangkan 4 sektor non basis Kabupaten Cirebon adalah pertambangan, perindustrian, perdagangan,

dan listrik gas dan air bersih. Kriteria ini dilihat dari apabila $LQ > 1$ artinya bahwa komoditas tersebut menjadi basis atau sumber pertumbuhan ekonomi. Komoditas memiliki keunggulan komparatif yang tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan daerah tetapi bisa diekspor ke luar daerah. Komoditas ini ditetapkan sebagai komoditas unggulan. Apabila $LQ < 1$, artinya bahwa sektor tersebut tidak menjadi sektor basis. Komoditas tidak memiliki keunggulan komparatif, produksinya belum bisa memenuhi kebutuhan daerah dan masih harus mengimpor dari daerah lain. komoditas ini ditetapkan sebagai kooditas non unggulan.

Tabel 3
Perbandingan PDRB Cirebon dan Jawa Barat
(Jutaan Rupiah)

No	Sektor	Cirebon		Jawa Barat	
		2008	2009	2008	2009
1	Pertanian	4.752.753	5.330.751	72.517.608	85.149.263
2	Pertambangan	58.525	63.854	14.904.132	13.278.186
3	Perindustrian	2.306.475	2.408.511	253.439.396	260.450.952
4	Perdagangan	3.225.926	3.559.237	129.912.046	149.056.003
5.	Jasa – jasa	2.113.237	2.400.419	47.095.619	56.686.561
6.	Listrik, Gas dan Air Bersih	347.794	375.639	16.913.616	19.549.186
7.	Konstruksi	975.183	1.086.993	21.596.583	24.223.185
8.	Pengangkutan	1.161.768	1.200.022	36.401.476	41.820.990
9.	Jasa Dunia Usaha	623.056	693.314	17.228.057	18.802.857
	Jumlah	15.564.717	17.118.740	610.008.533	669.017.183

Sumber: Cirebon Dalam Angka 2010 dan Jawa Barat Dalam Angka 2010

Tabel 4
LQ Kabupaten Cirebon

No	Sektor	Cirebon		Rata-Rata
		2008	2009	
1	Pertanian	2,67	2,45	2,56
2	Pertambangan	0,15	0,19	0,17
3	Perindustrian	0,36	0,36	0,36
4	Perdagangan	0,97	0,94	0,95
5.	Jasa – jasa	1,76	1,66	1,71
6.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,81	0,75	0,78
7.	Konstruksi	1,77	1,76	1,76
8.	Pengangkutan	1,25	1,12	1,19
9.	Jasa Dunia Usaha	1,42	1,45	1,43
	Jumlah	1,00	1,00	1,00

Sumber: Data Diolah

Pada perbandingan PDRB Kuningan dari tahun 2008 sampai dengan 2009, dapat dilihat bahwa sektor pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, jasa, listrik, gas dan air bersih dan konstruksi, pengangkutan dan jasa dunia usaha mengalami kenaikan. Tapi dari tabel diatas, sektor pertanian adalah sektor yang menyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Kuningan. Sehingga sektor pertanian merupakan sektor unggulan Kabupaten Kuningan. Berdasarkan hasil analisis LQ, Kabupaten Kuningan memiliki 5 sektor basis dan 4 sektor non basis. Sektor basis di Kabupaten Kuningan yaitu sektor pertanian, jasa-jasa, konstruksi, pengangkutan, dan jasa dunia usaha. Sedangkan 4 sektor non basis Kabupaten Kuningan adalah pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan listrik gas dan air bersih. Kriteria ini

dilihat dari apabila $LQ > 1$ artinya bahwa komoditas tersebut menjadi basis atau sumber pertumbuhan ekonomi. Nilai LQ yang tinggi bukan berarti mencerminkan tingginya nilai komoditas yang dihasilkan oleh sektor tertentu di daerah, namun nilai itu adalah nilai relatif terhadap share komoditas sektor tertentu di kabupaten dengan komoditas sektor tertentu di propinsi. Komoditas tertentu bisa jadi dalam perhitungan LQ merupakan komoditas dari sektor non basis akan tetapi realita di lapangan justru komoditas tersebut adalah komoditas unik dan menjadi produk utama kebanggaan daerah seperti ubi jalar yang sudah diekspor ke luar negeri dalam bentuk pasta, tape ketan, sirup jeruk nipis peras. Sektor basis yang merupakan sektor unggulan daerah perlu ditingkatkan kembali baik secara kualitas dan kuantitas.

Sektor basis memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan PDRB. Sektor non basis pun perlu

ditingkatkan walaupun kontribusinya terhadap PDRB relatif kecil.

Tabel 5
Perbandingan PDRB Kuningan dan Jawa Barat
(Jutaan Rupiah)

No	Sektor	Kuningan		Jawa Barat	
		2008	2009	2008	2009
1	Pertanian	2.212.573,13	2.445.947,37	72.517.608	85.149.263
2	Pertambangan	60.321,73	67.943,81	14.904.132	13.278.186
3	Perindustrian	144.565,58	167.493,82	253.439.396	260.450.952
4	Perdagangan	1.404.838,77	1.708.147,55	129.912.046	149.056.003
5.	Jasa – jasa	1.559.741,50	1.807.118,03	47.095.619	56.686.561
6.	Listrik,Gas dan Air Bersih	38.396,67	40.963,67	16.913.616	19.549.186
7.	Konstruksi	350.957,52	426.619,72	21.596.583	24.223.185
8.	Pengangkutan	833.038,11	965.158,76	36.401.476	41.820.990
9.	Jasa Dunia Usaha	443.493,57	513.832,07	17.228.057	18.802.857
	Jumlah	7.047.926,58	8.143.224,80	610.008.533,00	669.017.183,00

Sumber: Kuningan Dalam Angka 2010 dan Jawa Barat Dalam Angka 2010

Tabel 6
LQ Kabupaten Kuningan

No	Sektor	Kuningan		Rata-Rata
		2008	2009	
1	Pertanian	2,64	2,49	2,56
2	Pertambangan	0,35	0,44	0,40
3	Perindustrian	0,05	0,06	0,05
4	Perdagangan	0,94	0,99	0,96
5.	Jasa – jasa	2,87	2,76	2,81
6.	Listrik,Gas dan Air Bersih	0,20	0,18	0,19
7.	Konstruksi	1,41	1,52	1,47
8.	Pengangkutan	1,98	2,00	1,99
9.	Jasa Dunia Usaha	2,23	2,37	2,30
	Jumlah	1,00	1,05	1,03

Sumber: Data Diolah

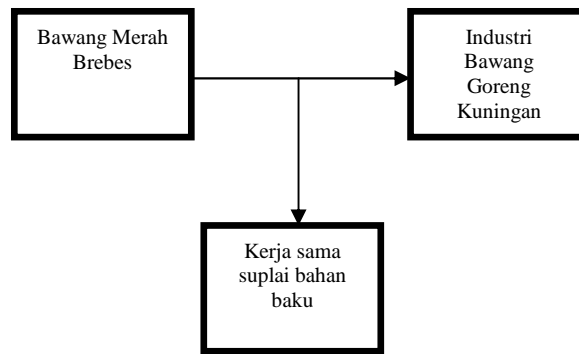
2. Analisis Peluang Investasi dan Kerja Sama Regional di Kawasan Perbatasan Brebes, Cirebon dan Kuningan

a. Peluang Kerja Sama Wilayah Brebes-Kuningan di Bidang Pertanian

Pada bidang pertanian, produksi bawang merah dari

Brebes dapat dijual ke Kuningan. Di Kuningan terdapat industri pembuatan bawang goreng yang produknya telah menembus

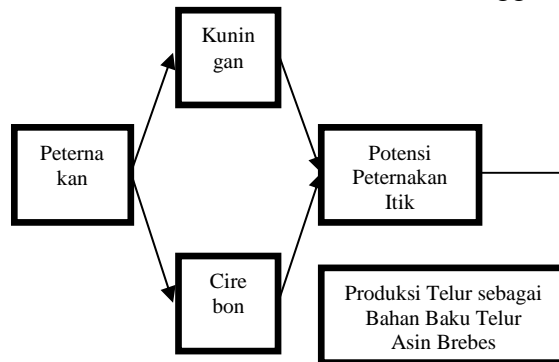
pabrik mi nasional sehingga bisa dilakukan kerja sama antar wilayah Kuningan-Brebes.



b. Peluang Kerja Sama Wilayah Brebes-Kuningan-Cirebon di Bidang Peternakan

Selain itu, pada bidang peternakan, Brebes yang identik dengan telur asinnya dapat melakukan kerja sama dalam suplai telur bebek sebagai bahan baku

pembuatan telur asin dengan Kuningan dan Cirebon. Hal ini dikarenakan ternak itik di kedua wilayah memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, selain memiliki lahan yang luas, Cirebon dan Kuningan memiliki banyak pesawahan yang bisa dijadikan tempat mengembalakan itik.



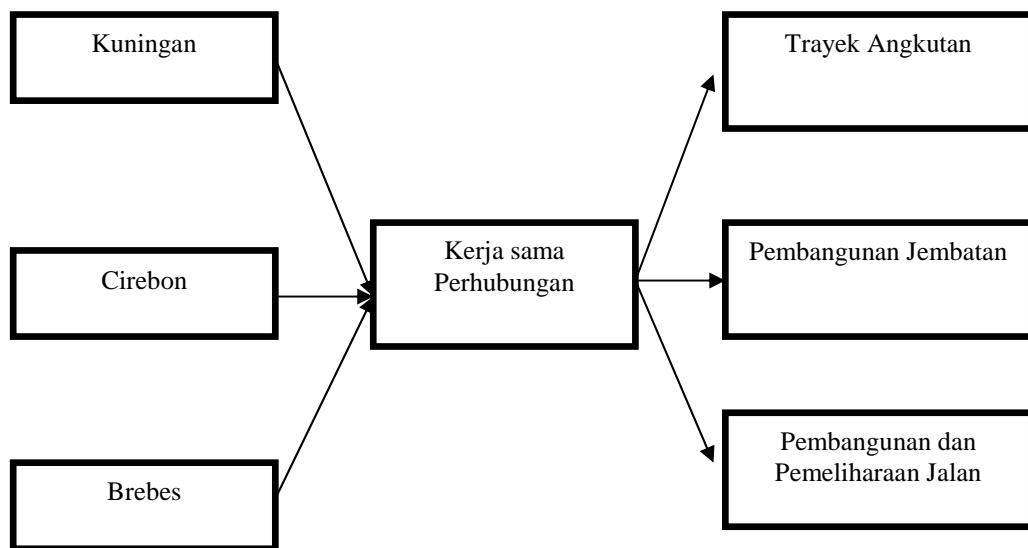
yang perhubungan, lakukan kerja sama dalam pembangunan

c. Peluang Kerja Sama Wilayah Brebes-Kuningan-Cirebon di Bidang Perhubungan

infrastruktur berupa jalan, jembatan yang menghubungkan wilayah

tersebut dengan sistem pembangunan yang dibiayai bersama. Selain itu, dibukanya trayek angkutan yang menghubungkan masing-masing wilayah dapat membantu mobilitas para

warga untuk pergi ke daerah yang dituju merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan, ambil contoh trayek Cibingbin-Malahayu.



d. Peluang Kerja Sama Wilayah Cirebon-Kuningan di Bidang Pariwisata

Di bidang pariwisata, Kuningan yang memiliki banyak obyek wisata dapat bekerja sama dengan Cirebon yang memiliki banyak hotel. Para wisatawan

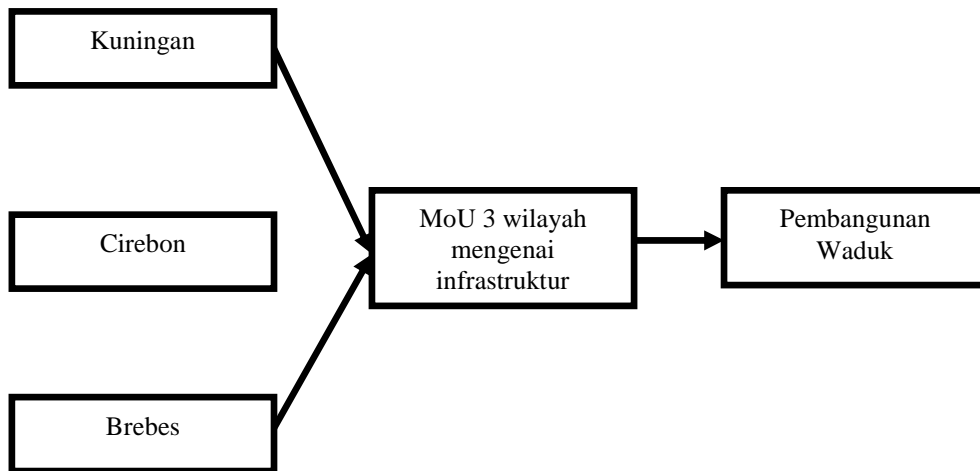
bisa menginap di hotel-hotel yang terdapat di Cirebon dan berwisata di Kuningan dan membeli oleh-oleh di Kuningan sehingga dapat menumbuhkan perekonomian kedua daerah.



e. Peluang Kerja Sama Wilayah Brebes-Kuningan di Bidang Infrastruktur

Analisis peluang kerja sama wilayah yang dapat dilakukan yaitu pembuatan waduk yang dapat mengairi irigasi di ketiga

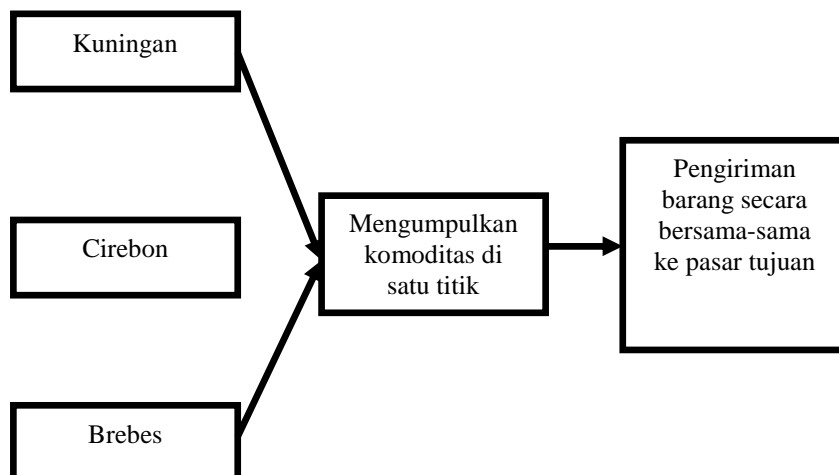
wilayah selain sebagai sumber air baku bagi konsumsi air bersih di ketiga wilayah. Diperlukan koordinasi dalam masalah anggaran dan pelaksanaan pekerjaan.



f. Peluang Kerja Sama Wilayah Brebes-Kuningan-Cirebon di Bidang Lain

Kerja sama antar wilayah yang dapat dilakukan yaitu pemasaran produk-produk unggulan ke pasar potensial dengan memfasilitasi pengiriman

barang sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi para produsen komoditas unggulan serta melindungi produsen dari disparitas harga di pasar.



Kerjasama wilayah dalam sektor pariwisata yang dapat diusulkan sebagai peluang investasi yaitu pendirian rest area di titik-titik tertentu yang telah disepakati bersama di sekitar wilayah perbatasan ketiga wilayah. Pendirian rest area yang di dalamnya diantaranya terdapat outlet-outlet makanan khas ketiga wilayah, seni budaya yang menjadi ciri khas daerah, obyek dan destinasi wisata wilayah tersebut yang sekiranya mampu menarik wisatawan untuk datang berkunjung ke daerah tersebut maupun toko-toko penyedia kebutuhan pokok masyarakat di antara wilayah perbatasan. Di rest area tersebut juga dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai daerah tersebut bagi para wisatawan yang sedang beristirahat. Selain outlet yang ada di dalam rest area, adanya rest area tersebut diharapkan mampu menggerakkan perekonomian warga di sekitar daerah perbatasan. Hal ini dimaksudkan dengan adanya rest area, warga yang berada di sekitar daerah tersebut tidak perlu pergi jauh ke pusat kota untuk berbelanja kebutuhan pokoknya sehingga dapat menghemat biaya

transportasi masyarakat. Bisa juga masyarakat yang berada di rest area berjualan di sekitar wilayah rest area untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar wilayah perbatasan.

E. Pembahasan dan Kesimpulan

Daerah perbatasan merupakan kawasan yang sering kurang mendapat perhatian pemerintah daerah yang pusat pemerintahan sekaligus aktivitas perekonomian terpusat di wilayah kota. Diperlukan suatu konsep pengembangan wilayah yang lebih menekankan segi pemerataan pembangunan daripada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu untuk membantu masyarakat yang berada di wilayah yang kurang menguntungkan, dibutuhkan kebijaksanaan. Konsep pengembangan wilayah yang dikemukakan oleh Sthor, merupakan konsep pengembangan wilayah terbelakang yang didasarkan pada paradigma pembangunan dari bawah. Menurut Sthor, hal tersebut dilakukan dengan memobilisasi maksimum sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya institusional masing-masing wilayah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Kebijaksanaan dalam konsep ini berorientasi pada :

1. Pelayanan kebutuhan dasar yang diorganisir

- secara teritorial;
- 2. Pembangunan perdesaan;
- 3. Penerapan teknologi yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya manusia dan alam secara penuh;
- 4. Kelembagaan regional berdasarkan keterpaduan teritorial.

Pengembangan wilayah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat disebut sebagai pengembangan wilayah teritorial. Penekanan pendekatan ini adalah pemerataan dan peningkatan kualitas hidup seluruh penduduk di wilayah sasaran (Friedman and Weaver, 1979 : 193). Dalam pendekatan teritorial, ruang dipandang sebagai distribusi 'kekuatan' (territorial power) dan 'kehendak' (territorial will). Kebijakan tata ruang teritorial merupakan suatu 'pengaturan' terhadap distribusi 'kekuatan' dan 'kehendak' tersebut.

Lebih lanjut Sthor, menyebutkan bahwa konsep pengembangan wilayah tersebut bertujuan pada pengintegrasian sumber daya ekonomi, lingkungan, dan sosial yang tersedia secara regional semaksimal mungkin. Karenanya hal ini memerlukan asumsi yang disebut sebagai 'penutupan selektif', dalam kaitannya untuk merintang efek operasi otonomi dari pasar berskala besar yang mengurangi potensi pembangunan wilayah yang kurang berkembang. Hal ini secara khusus berarti memudahkan penahanan faktor-faktor produksi yang diperlukan bagi pembangunan wilayah

tersebut dan mengurangi transfer dari luar yang melemahkan potensi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang wilayahnya. Integrasi secara teritorial sumber daya yang tersedia dan struktur sosialnya akan membentuk suatu basis bagi implus pembangunan yang telah ditentukan secara lebih internal (Sthor, 1981 : 45).

Pengintegrasian kegiatan diberbagai bidang pembangunan sangat diperlukan, tetapi untuk mencapai hal tersebut adalah tidak mudah. Untuk beberapa negara Asia Pasifik, hal tersebut dilakukan melalui pengintegrasian pembangunan daerah. Hal ini dipandang sebagai bentuk perencanaan antara tingkat regional dan tingkat lokal. Menurut World Bank LED Quick Reference Guide, alasan diberikannya pendekatan ini karena:

1. Untuk pengeksploitasian sumber daya lokal, dengan penggunaan modal, tenaga dan faktor produksi lainnya dengan lebih optimal;
2. Konsep perencanaan lokal dengan melibatkan partisipasi masyarakat dapat lebih mudah terealisasi pada tingkat lokal dari pada tingkat regional;
3. "Lokal" lebih kecil dari pada "Wilayah", terlihat lebih homogen dari pada wilayah, dengan demikian akan dapat mengurangi

kompleksitas masalah;

4. Koordinasi implementasi antara bidang-bidang yang terkait menjadi lebih mudah.

Terdapat 5 (lima) tingkatan dalam perencanaan;

1. *Macro Stage*, merupakan perencanaan nasional dengan tujuan umum;
2. *Sektor Stage*, merupakan perencanaan sektoral berkaitan dengan sektor basis;
3. *Interregional Stage*, dititikberatkan pada koordinasi antar wilayah;
4. *Regional Stage*, dititikberatkan pada koordinasi antara sektor pada masing-masing wilayah;
5. *Micro Stage*, merupakan perencanaan lokal dimana tujuan pembangunan lebih bersifat spesifik.

Diperlukan sebuah kebijakan regional untuk mengembangkan kawasan perbatasan antara Wilayah Jawa Tengah dan Wilayah Jawa Barat. Berdasarkan hasil pengamatan sudah diidentifikasi sektor-sektor unggulan di 3 wilayah Kabupaten, yaitu Kabupaten Brebes, Kuningan dan Cirebon. Sektor-sektor yang saling terkait, berpeluang untuk dijadikan target investasi dalam rangka mengembangkan perekonomian di kawasan perbatasan. Kolaborasi bisa

dilakukan bersifat backward linkage, forward linkage atau bersifat konglomerasi. Backward linkage bisa berupa kerja sama terkait pemenuhan kebutuhan bahan baku, sedangkan backward linkage adalah kerja sama dalam memasarkan produk secara bersama-sama. Pembentukan kawasan perekonomian di daerah perbatasan adalah salah satu contoh bentuk kegiatan bersifat konglomerasi.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2010. *Kabupaten Brebes Dalam Angka 2010*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes.
- Anonim, 2010. *Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2010*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon.
- Anonim, 2010. *Kabupaten Kuningan Dalam Angka 2010*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan.
- Anonim, 2010. *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2010*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Anonim, 2010. *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2010*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BP STIE YKPN.
- Friedmann, J. and Weaver, C. 1979. *Territory and Function*. London: Edward Arnold
- Jamli, A., & R. Rizaldy. 1998. "Kinerja Komoditas Elektronika Indonesia 1981-

- 1995: Pendekatan Keunggulan Komparatif". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 13, No.3, hal. 1-17.
- Munir, R dan B. Fitanto. 2007. Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif: Masalah, Kebijakan, dan Panduan Pelaksanaan Kegiatan. Local Governance Support Program, USAID.
- Porter, M.E. 1990. *The Competitive Advantage of Nations*. The Free Press. New York: A Division of Macmillan, Inc.
- Stöhr, W. B. and Taylor, D. R. F. (eds) 1981. *Development from Above or Below?* Chichester: J. Wiley and Sons.
- Stöhr, W. B. (Ed). 1990. *Global Challenge and Local Response*. London: Mansell
- Sugiyanto, Catur. 2007. *Strategi Penyusunan Komoditas Unggulan Daerah*, PSEKP UGM. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Peningkatan Peran Lembaga Keuangan Daerah sebagai Sumber Pembiayaan Sektor Usaha Informal dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, 3 September 2007.
- The World Bank Urban Development Unit. *Local Economic Development, LED Quick Reference Guide*. October 2001.
- The Peter F. Drucker Foundation for Nonprofit Management, 1996. *Emerging Partnership*. Report.